

Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Kantor Kecamatan Sumobito

Tanty Putri Pravitasari¹⁾, Irma Ika Febryani²⁾, Mohamad Djasuli³⁾

¹Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: pravita.nnty@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: irmaikafebryani898@gmail.com

³Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
email : mdjasuli@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand the forms and practices of good governance in the Sumobito District office. This study uses a qualitative descriptive analysis technique. This study found that the implementation of Good Corporate Governance in the Sumobito District Office was in accordance with the mechanism of good governance although there were still some weaknesses in its implementation in the field.

Keywords: Good Governance

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan praktik tata kelola yang baik pada kantor Kecamatan Sumobito. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa implementasi Good Corporate Governance pada Kantor Kecamatan Sumobito sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan.

Kata Kunci : Good Governance

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang berkembang begitu pesat, mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang negara, dalam perkembangan pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perencanaan perubahan. Dalam kaitan ini, tujuan yang diinginkan adalah untuk membawa ketertiban dan penghidupan masyarakat ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Ini adalah pengenalan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah penyelewengan dana investasi dan korupsi politik dan administrasi, membangun disiplin anggaran dan kerangka hukum dan politik, pertumbuhan aktivitas bisnis.

Kecamatan Sumobito merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang fungsional dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang seharusnya lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep Good Corporate Governance untuk keberlangsungan lembaga dalam jangka panjang. Hal ini karena ketika Anda menjalankan sebuah agensi, Anda tidak hanya perlu memberdayakan aspek internal, tetapi juga mampu menyeimbangkan semua aspek internal dan eksternal dengan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan yang dibuat.

Pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dasar tata kelola yang baik sebagai elemen kunci. Terminologi good governance memang belum dibakukan, namun banyak definisi yang mencoba mengkaji tentang pengertian good governance. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa good governance dipandang sebagai elemen penting dalam menjamin kesejahteraan negara. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) menetapkan berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, partisipasi, dan daya tanggap sebagai prinsip utama tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dibuat dalam bentuk usulan penelitian“ ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KANTOR KECAMATAN SUMOBITO”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas Penerapan Good Corporate Governance pada kantor Kecamatan sumobito sebagai focus penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama – sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Pada penelitian yang akan dilakukan nanti akan dilengkapi dengan Analisis Model Interaktif. Perbedaannya hanya sedikit antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Good Governance

Istilah good governance berasal dari bahasa Latin, bahasa utama Eropa, khususnya gubernare, diserap ke dalam bahasa Inggris, menjadi government, yang biasanya berarti mengarahkan (mengatur, mengontrol), mengarahkan (gerakan) atau mengatur (order). Nama ini diberikan dalam bahasa Inggris sebagai authority by rule, dengan kata lain sebagai authority as rule. Pengertian good governance di atas adalah pengertian atau dasar pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Tata kelola yang baik sebenarnya berarti manajemen atau tata kelola yang baik, bukan tata kelola yang baik. Nyatanya, hal ini berbeda dengan pemahaman dasar yang ada di lingkungan kita saat ini, termasuk yang ditetapkan oleh regulator pemerintah dan lembaga pengawas keuangan dan pembangunan.

World Bank (Mardiasmo, 2009) mendefinisikan governance sebagai “cara di mana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan sosial”. Sementara itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan pemerintahan sebagai “penggunaan kekuatan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan”. Dalam kaitan ini, Bank Dunia menekankan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP menekankan pada pengelolaan aspek politik, ekonomi dan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Tata kelola politik adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Manajemen administrasi mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Seiring berjalannya waktu, konsep good governance terfokus pada proses multi segi, konsep lama yang masih diasosiasikan hanya dengan negara sebelum tahun 1990-an, namun kini konsep tersebut multi segi, yaitu tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga di luar pemerintah, publik dan swasta).

Menurut (Mardiasmo, 1998), pengertian good governance adalah suatu pendekatan pembangunan sektor publik melalui good governance. Juga, seperti yang dikutip oleh Bank Dunia (Wahab, 2002), tata kelola yang baik adalah konsep pelaksanaan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari malpraktik dan kurangnya investasi, serta mencegah korupsi politik dan administrasi. Untuk membawa disiplin keuangan dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk pengembangan kegiatan bisnis. World Bank juga mengartikan bahwa good governance adalah hubungan yang simultan dan konstruktif antara pemerintah, industri dan masyarakat (Efendy, 1996).

Mengenai good governance (Mardiasmo, 2005), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah good governance of public affairs. Kondisi tersebut bertujuan untuk mewujudkan organisasi pembangunan yang tangguh dan bertanggung jawab yang mengikuti prinsip demokrasi, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Tata pemerintahan yang baik adalah konsep yang pada dasarnya mengacu pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang saling eksklusif. Ini adalah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mengelola pemerintahan negara. Hakikat governance bukan hanya bagaimana pemerintah atau pemerintahan memiliki kekuasaan dan kewenangan, tetapi yang lebih penting bagaimana kekuasaan dan kewenangan itu harus bersinergi dan berinteraksi dengan aktor-aktor non-pemerintah. Pemerintahan, politik dll. sehingga memfasilitasi kepentingan tersebut.

Prinsip Good Governance

Kunci utama untuk memahami good governance adalah memahami prinsip-prinsip yang terkait dengannya. Berdasarkan prinsip ini, kriteria kinerja pemerintah dikumpulkan. Tata kelola yang baik atau buruk dapat dimulai ketika semua elemen prinsip tata kelola yang baik dibenahi.

Menurut (Mardiasmo, 2009), ada prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab,
- 2) transparan,
- 3) Demokrasi,
- 4) Supremasi hukum.

Jelaskan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

1) Kewajiban

Bertanggung jawab kepada publik atas semua kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan bagi semua lembaga dan organisasi publik untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap organisasi harus melaksanakan tugasnya secara adil dan tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku, menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

2) Transparansi

Transparansi dilandasi oleh kebebasan menerima informasi, informasi untuk kepentingan umum dapat disampaikan langsung kepada pihak yang membutuhkan.

3) Demokrasi

Demokrasi terdiri dari tiga elemen utama: partisipasi, pengakuan perbedaan pendapat dan realisasi kepentingan publik. Prinsip demokrasi harus diterapkan baik dalam proses pemilu maupun dalam pemilu sebagai proses penyelenggaraan negara.

4) Negara Hukum Nasional

Kerangka hukum ditegakkan secara adil dan mandiri. Supremasi hukum harus dibangun sedemikian rupa sehingga lembaga-lembaga negara dan administrasi nasional selalu bertindak dengan keyakinan bahwa mereka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menjalankan tugasnya.

Ciri - Ciri Good Governance

- Menurut (Ida, 2012), good governance memiliki kualitas dan karakteristik sebagai berikut.
- Melaksanakan interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat terutama dalam struktur kehidupan sosial, politik dan sosial ekonomi.
- Adanya jaringan dari berbagai sistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang memudahkan komunikasi, sinergi dan menghasilkan output yang berkualitas.
- Adanya proses pemberdayaan diri (proses keputusan diri), upaya membangun pemerintahan (swasembada) untuk mengatasi kekacauan lingkungan dan dinamika sosial yang tinggi.
- Menyeimbangkan kekuatan menciptakan dinamisme, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni dan kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan.
- Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kemandirian yaitu koordinasi dan fasilitasi..

Manfaat Good Governance

Penyelenggaraan good governance memiliki peran dan kepentingan yang besar dalam membawa perubahan positif bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat pada umumnya. Menurut (Single, 2012), beberapa manfaat dapat dicapai dengan mempraktikkan tata kelola yang baik:

- Minimalkan biaya agensi yang timbul karena otorisasi. Biaya tersebut dapat berupa kerugian karena pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian.
- Meningkatkan kinerja pemerintahan Pemerintahan yang berjalan dengan baik dalam keadaan sehat menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
- Membangun citra negara Citra negara merupakan faktor penting yang erat kaitannya dengan kinerja dan eksistensi negara di mata masyarakat dan lingkungannya. Manfaat mengenalkan good governance tentunya sangat efektif bagi pemerintah, dimana manfaat good governance menunjang pertumbuhannya pada pemerintahan saat ini tidak hanya sekarang tetapi juga dalam jangka panjang. Selain untuk meningkatkan citra negara di mata masyarakat, peningkatan ekonomi negara untuk mengatasi permasalahan negara yang ada tentunya menjadi nilai tambah.

Tujuan Good Government Governance

Tujuan manajemen yang efektif (Single, 2012) adalah:

- Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Harta nasional yang terpelihara dengan baik.
- Pemerintah akan melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Pengelolaan yang transparan.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik secara efektif dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang ada dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Tujuan tata kelola yang baik adalah untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik yang pada akhirnya memberi nilai tambah bagi semua dan melindungi barang publik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Government Governance

Menurut Unida (2010), ada banyak faktor dan kondisi yang menyebabkan penggunaan good governance untuk mensukseskan good governance:

1. Melakukan Pekerjaan Rakyat (Rakyat) Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat tergantung pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah (PEMDA), termasuk DPD. Selain itu, ada perangkat lain di sirkuit atau perangkat tersebut, yaitu perangkat itu sendiri.
2. Alasan Partisipasi Masyarakat Tata pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Masyarakat daerah merupakan bagian penting dari sistem nasional sebagai sistem dan sebagai individu. Salah satu ciri orang sukses dalam manajemen yang baik adalah ide manajemen pendukung. Metode partisipasi masyarakat yang efektif meliputi:
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (decision making);
 - b. Partisipasi dalam kegiatan (melakukan pekerjaan);
 - c. partisipasi dalam penggunaan hasil (biaya evaluasi);
 - d. Penelitian partisipatif.
3. Asosiasi Keuangan Masyarakat (Pendapatan atau Anggaran) Salah satu aturan penting masyarakat untuk melihat secara jelas kemampuan mengurus dan mengurus keluarga adalah kebebasan finansial. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan kota yang membutuhkan bantuan keuangan dengan baik.
4. Faktor instrumental juga penting untuk manajemen yang efektif dan sukses. Dari sudut pandang ini, tata pemerintahan yang baik adalah alat atau senjata yang digunakan untuk memfasilitasi pekerjaan dan operasi pemerintah.
5. Faktor kinerja dan manajemen organisasi Organisasi dan manajemen merupakan faktor yang mempengaruhi terselenggaranya manajemen yang baik, karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi-fungsi manajemen: POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling). Organisasi dan manajemen yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan good governance

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Kantor Kecamatan Sumobito

1. Prinsip Akuntabilitas
Penerapan asas tanggung jawab mendorong semua perangkat pemerintahan daerah untuk berbuat semaksimal mungkin untuk memajukan negara dalam masyarakat, karena setiap perkara dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan hukum. Lihat, pelaksanaan pertanggungjawaban di negara bagian Sulobito sangat berhasil, makanya ada LAKIP atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
2. Prinsip keterbukaan
Dalam teori, pengetahuan mengacu pada arus bebas pengetahuan. Semua kebijakan, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan informasi tersebut harus dapat diakses untuk dipahami dan dianalisis. Upaya telah dilakukan untuk mempromosikan konsep identitas secara efektif di Pemerintah Kabupaten Sulobito. Arus informasi dan komunikasi yang efektif dengan publik dipastikan melalui fungsi administrasi pemerintahan negara. Ada juga transparansi dalam pembuatan kebijakan publik dan proses implementasi.
3. Pemerintahan yang demokratis
Demokrasi memiliki tiga elemen utama: partisipasi, toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan pencapaian kebaikan bersama. Keterlibatan masyarakat sangat baik dan hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan proyek di Kabupaten Sumobeto. Penerapan asas-asas hukum berdampak positif terhadap proses, pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi berbagai segmen/kelompok masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong kegiatan sosial dan kreatif di masyarakatnya dan berpartisipasi dalam kegiatan dukungan pemerintah daerah.
4. Hukum
Menjamin supremasi hukum membutuhkan penerapan sistem hukum yang adil dan merata, termasuk hukum hak asasi manusia. Hal ini telah berhasil dilakukan di Kabupaten Sumobeto beserta faktor-faktor lain yang mendukung pelaksanaannya. Faktor pendukung hukum di Kabupaten Sumibito:
 - I. Dukungan dari pemerintah federal dan Kongres
 - II. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah (pengawas) pemerintah daerah, otoritas terkait, termasuk kepolisian, dan pertukaran korespondensi antara organisasi, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.
 - III. Ketersediaan upaya hukum dan hukuman yang tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Kantor Kecamatan Sumobito yaitu, dalam proses pelaksanaan administrasi pada Kantor Kecamatan Sumobito telah menerapkan beberapa prinsip Good corporate governance.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak Mohamad Djasuli selaku dosen pengampu mata kuliah *good corporate governance* (gcg) yang sudah memberikan materi seputar *good corporate governance* mengenai Penerapan Good Corporate Governance Pada Kantor Kecamatan Sumobito dengan baik sehingga penulis dapat membuat artikel ini walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak jurnal yang telah mempublish artikel ini serta kepada teman-teman seperjuangan di matkul GCG. Penulis berharap artikel ini bermanfaat untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, O. U. (1996.). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Mandar .
- Ida, L. (2012). Otonomi Daerah Dalam Interaksi Kritis Stakeholder. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan.
- Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. (2021). Dipetik Desember 1, 2021, dari [jombangkab-simkec: https://jombangkabsimkec.com/camat/Beranda/MDAwMTk=](http://jombangkab-simkec.com/camat/Beranda/MDAwMTk=)
- Mardiasmo. (1998). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Diambil kembali dari kamus.tokopedia.
- Mardiasmo. (2009). kuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurcholis, H. (2005). Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Sumobito, Jombang. (2021). Dipetik 12 02, 2021, dari wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sumobito,_Jombang
- Tunggal, A. W. (2012). Pemeriksaan Kecurangan (fraud auditing). Rineka Cipta.
- Ulisah, S. (2016). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat. Dipetik Desember 02, 2021, dari Gema Keadilan: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3645>